

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi mencakup berbagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi di suatu negara atau wilayah dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses ini melibatkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan (Asrahmaulyana, 2023). Terdapat tiga sasaran utama dalam pembangunan ekonomi, yaitu memperluas ketersediaan barang dan kebutuhan pokok masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan memberikan pilihan yang lebih luas dalam aspek ekonomi maupun sosial, serta menciptakan kesejahteraan yang merata melalui distribusi pendapatan yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Safitri *et al.*, 2021).

Keberhasilan pembangunan daerah ditandai oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil pembangunan di setiap daerah tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda. Dwiwahju (2016) mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pembangunan daerah, yaitu perbedaan potensi daerah, partisipasi para *stakeholder* (seperti masyarakat, pengusaha lokal, dan investor), kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola ekonomi. daerah yang mampu memaksimalkan keempat faktor ini memiliki peluang lebih besar untuk mencapai pembangunan ekonomi yang unggul dibandingkan daerah yang belum mengembangkannya.

eski kaya sumber daya alam, didukung *stakeholder*, SDM berkualitas, ijakan inovatif, kenyatannya tidak semua daerah mampu memanfaatkan



potensi ini secara optimal. Ketidakmerataan dalam pengembangan seringkali menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan mencerminkan perbedaan standar hidup relatif di masyarakat, yang dipengaruhi oleh perbedaan anugerah awal antar wilayah. Perbedaan ini menyebabkan tingkat pembangunan yang tidak merata, sehingga menciptakan jurang ketimpangan di berbagai daerah (Kuncoro, 2006).

Ketimpangan ini tidak hanya muncul dari faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai elemen lain, seperti perbedaan dalam sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, serta karakteristik dan potensi wilayah. Selain itu, kondisi sosial demografi yang bervariasi, aksesibilitas terhadap barang dan jasa yang terbatas, serta ketidakmerataan dalam alokasi dana pembangunan turut memperburuk situasi ini (Adisasmita, 2013).

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah provinsi yang awalnya hanya 34, namun sekarang berkembang menjadi 38 provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemekaran tersebut melahirkan empat provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, yang diatur dalam empat Undang-Undang (UU) terpisah yang disahkan pada tahun 2022. Keempatnya tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 2022 (Papua Selatan), UU Nomor 15 Tahun 2022 (Papua Tengah), UU Nomor 16 Tahun 2022 (Papua Pegunungan), dan UU Nomor 29 Tahun 2022 (Papua Barat Daya). DPR dan pemerintah menilai pembentukan provinsi baru di Papua sebagai langkah strategis untuk mempercepat pelayanan publik, memperpendek rentang kendali, meningkatkan efektivitas pemerintahan,

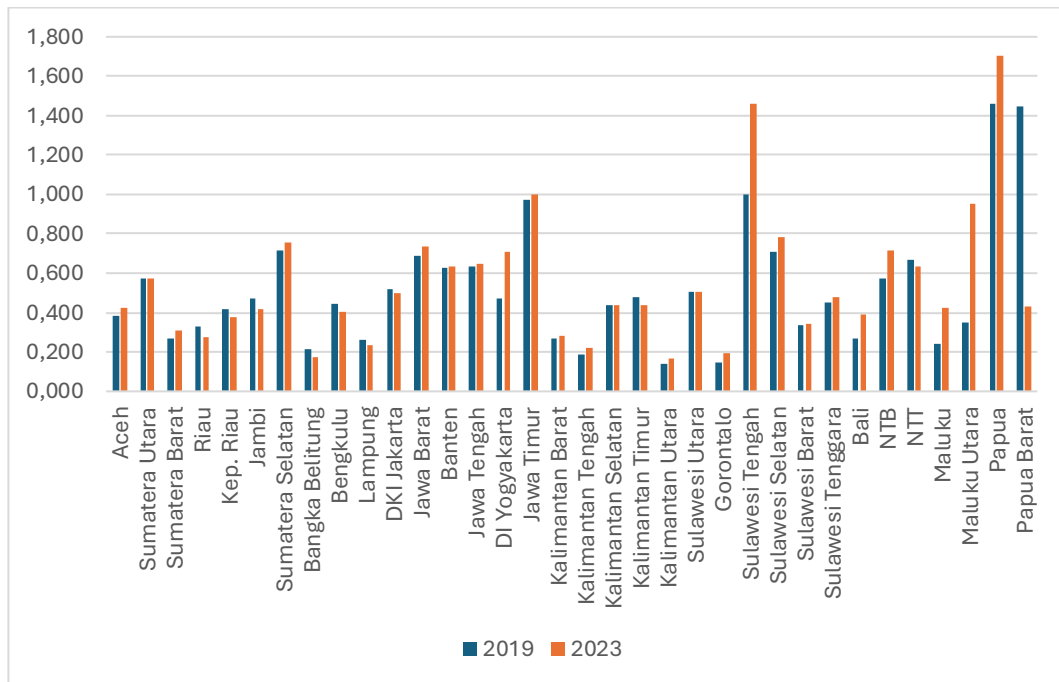
kuat eksistensi adat dan budaya lokal, serta mengurangi ketimpangan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Dengan jumlah provinsi yang semakin bertambah, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Keberagaman kondisi alam, sosial, dan ekonomi antarwilayah menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan teknologi. Provinsi-provinsi yang memiliki kekayaan alam melimpah cenderung menjadi pusat aktivitas ekonomi, sedangkan wilayah lain yang minim sumber daya berisiko tertinggal dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah memang menunjukkan peningkatan aktivitas, namun distribusi manfaatnya tidak selalu merata. Di sisi lain, indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup juga memperlihatkan variasi mencolok antarprovinsi, yang sering kali mencerminkan ketimpangan wilayah. Belanja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, turut berperan penting dalam memperkecil atau bahkan memperparah ketimpangan, tergantung pada bagaimana anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk melihat lebih dekat bagaimana kondisi ketimpangan wilayah tercermin dalam Indeks Williamson dari 34 provinsi di Indonesia sebagai gambaran awal kondisi pembangunan nasional. Perlu dicatat bahwa empat provinsi baru hasil pemekaran di Papua dan Papua Barat, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, belum dimasukkan dalam grafik berikut karena keterbatasan data yang belum tersedia secara lengkap dan konsisten dalam kurun waktu yang sama dengan provinsi lainnya.





Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kemendagri (data diolah)

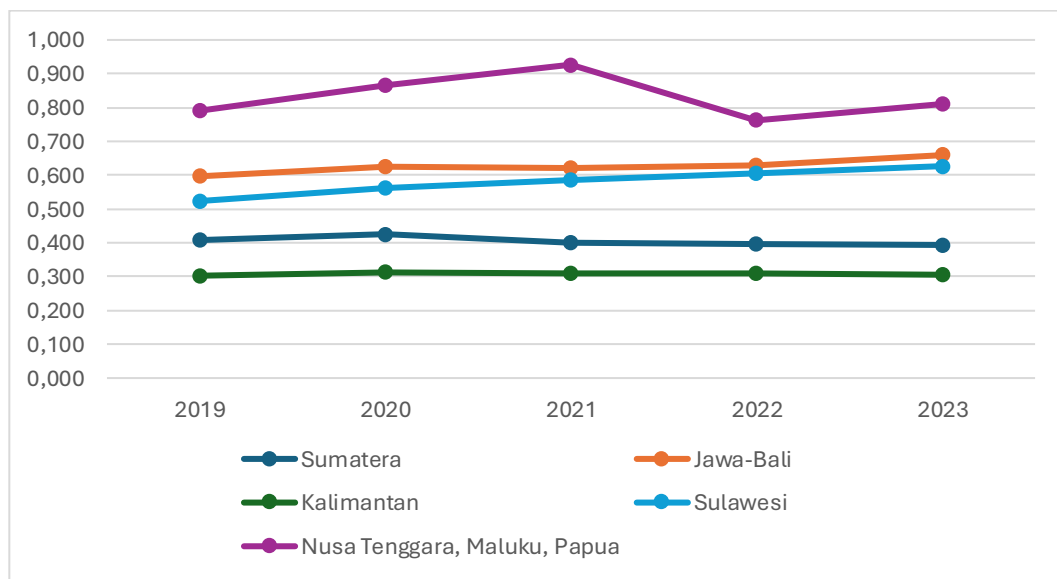
Gambar 1. 1 Indeks Williamson 2019 dan 2023

Gambar 1.1 menggambarkan perkembangan Indeks Williamson di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2019 dan 2023. Secara keseluruhan, terlihat adanya variasi perubahan tingkat ketimpangan di tiap provinsi. Beberapa provinsi, seperti DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua, mengalami peningkatan Indeks Williamson yang signifikan pada tahun 2023, mencerminkan meningkatnya ketimpangan di wilayah tersebut. Sebaliknya, sejumlah provinsi seperti Riau, Bengkulu, dan NTT menunjukkan penurunan nilai indeks, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pembangunan. Adapun Papua Barat yang mengalami penurunan nilai indeks pada 2023 akibat terjadinya pemekaran. Sementara itu, provinsi lainnya menunjukkan perubahan



leks yang cenderung stabil, baik dalam bentuk peningkatan maupun an yang tidak terlalu signifikan.

Setiap provinsi menghadapi tantangan berbeda terkait ketimpangan, salah satunya adalah Sulawesi Tengah yang termasuk dalam kategori ketimpangan ekstrem. Ketimpangan di wilayah ini disebabkan oleh fokus pembangunan yang bertumpu pada pusat industri seperti Morowali dan Banggai, sementara wilayah seperti Donggala, Parigi Moutong, dan Sigi tertinggal dalam infrastruktur dan layanan dasar, bahkan 37% desa masih tergolong *blankspot*. Di sektor ketenagakerjaan, ketimpangan makin diperparah oleh masuknya sekitar 21.000 tenaga kerja asing (11% dari total nasional), yang mendominasi posisi strategis di sektor tambang dan industri pengolahan. Ironisnya, pekerja lokal hanya dilibatkan pada level pekerjaan rendah dengan upah rendah dan minim jenjang karier, sementara posisi strategis justru diisi oleh pekerja luar yang dianggap lebih berpengalaman dan terampil.



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kemendagri (data diolah)

Gambar 1. 2 Perkembangan Indeks Williamson Berdasarkan Pulau di Indonesia



Lebih lanjut, Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan indeks Williamson tiap pulau di Indonesia yang bervariasi selama 2019–2023. Kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua mencatat indeks tertinggi dengan tren peningkatan hingga 2021 dan selanjutnya menurun akibat Provinsi Papua dan Papua Barat yang mengalami pemekaran. Di sisi lain, Jawa-Bali menunjukkan tren peningkatan hingga 2023, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Pulau Sulawesi mencatat tren peningkatan yang konsisten setiap tahun, sementara Pulau Sumatera mengalami kenaikan indeks pada 2020, namun menunjukkan penurunan secara bertahap hingga 2023. Sementara itu, Kalimantan memiliki nilai indeks terendah di antara semua wilayah dengan tren yang juga stabil selama periode tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, menunjukkan bahwa belum terjadi pemerataan pada tiap provinsi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait kondisi tersebut dengan mengambil judul “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Pemerintah terhadap Ketimpangan Wilayah Provinsi di Indonesia Periode 2019-2023*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Indonesia periode 2019-2023?



2. Apakah IPM berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Indonesia periode 2019-2023?

3. Apakah belanja pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Indonesia periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh IPM terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat beberapa manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan wilayah provinsi Indonesia.
2. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada bidang serupa.
3. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan tambahan terkait ketimpangan wilayah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Ketimpangan Wilayah

Dalam suatu daerah atau negara, ketimpangan atau disparitas adalah hal wajar dalam kegiatan perekonomian suatu wilayah. Perbedaan demografi di setiap wilayah menjadi faktor utama yang mempengaruhi kemampuan masing-masing daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan. Hal ini mengarah pada perbedaan yang jelas antara wilayah yang berkembang pesat (*developed region*) dan yang masih tertinggal (*underdeveloped region*) (Sjafrizal, 2012). Namun, World Bank (2016) memaparkan bahwa ketimpangan ekonomi adalah persoalan yang disebabkan oleh beberapa hal. Ketimpangan tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya alam dan letak geografis suatu wilayah. Ketidakmerataan pembangunan di Indonesia menyebabkan kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang fokus pada perbedaan antara kelompok masyarakat, ketimpangan wilayah lebih menyoroti perbedaan tingkat kemajuan antara daerah. Setiap daerah memiliki kapasitas pembangunan yang berbeda, dan ketika pembangunan dimulai di wilayah tertentu, hambatan regional yang besar dapat menghalangi pertumbuhan di daerah lainnya yang kurang berkembang.

Menurut Kuncoro (2006), kesenjangan mengacu pada standar hidup antar masyarakat, yang dipengaruhi oleh perbedaan faktor anugerah



awal (*endowment factor*) antar wilayah. Perbedaan ini menyebabkan tingkat pembangunan yang tidak merata di berbagai daerah, menciptakan jurang kesejahteraan yang semakin lebar. Ketimpangan antar wilayah ini menghambat perkembangan daerah-daerah tertinggal akibat rendahnya akses terhadap sarana dan prasarana ekonomi serta sosial.

Myrdal (1957) menambahkan bahwa ketimpangan regional sangat terkait dengan sistem kapitalis dan motif laba, di mana pembangunan cenderung terkonsentrasi di wilayah yang menawarkan keuntungan tinggi, sementara wilayah lain terabaikan. Kekuatan pasar yang dominan tanpa intervensi kebijakan dapat memperburuk ketimpangan ini, menyebabkan sebagian daerah berkembang pesat, sementara yang lainnya mengalami stagnasi.

Sjafrizal (2012) menjelaskan lebih lanjut terkait faktor-faktor utama yang menjadi penyebab ketimpangan antar wilayah, yaitu:

1. Perbedaan sumber daya alam antar daerah memengaruhi efisiensi produksi. Daerah dengan sumber daya alam melimpah dapat memproduksi barang dengan biaya lebih rendah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sementara daerah dengan keterbatasan sumber daya menghadapi biaya tinggi, menghambat daya saing dan pertumbuhan.
2. Kondisi demografis memengaruhi produktivitas kerja. Faktor seperti struktur penduduk, kesehatan, pendidikan, keterampilan, serta kebiasaan masyarakat memengaruhi daya tarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi.



3. Kurangnya mobilitas barang, jasa, dan migrasi menghambat distribusi dan perdagangan antar daerah, meningkatkan ketimpangan pembangunan, serta menyulitkan daerah terbelakang untuk berkembang.
4. Konsentrasi ekonomi di suatu wilayah mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Faktor seperti sumber daya alam melimpah dan fasilitas transportasi yang memadai memperkuat konsentrasi ini.
5. Alokasi dana mempengaruhi ketimpangan antar wilayah. Daerah dengan investasi lebih besar, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, mengalami pertumbuhan pesat, sementara daerah dengan investasi terbatas menghadapi kendala dalam pengembangan ekonomi.

Konsep ketimpangan wilayah dapat dipahami melalui berbagai teori yang menjelaskan faktor-faktor penyebab serta mekanisme terbentuknya disparitas pembangunan antar daerah. Beberapa teori yang relevan dalam menganalisis ketimpangan wilayah adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Neo-Klasik (Douglas C. North)

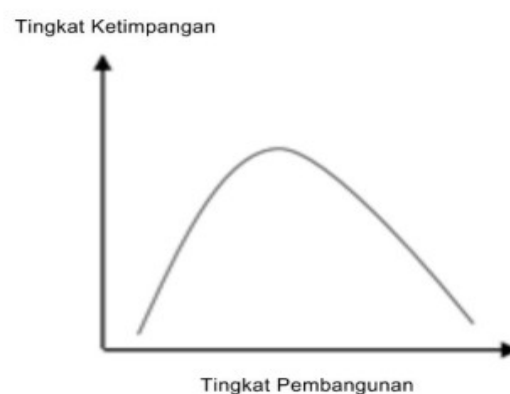
Konsep terkait ketimpangan wilayah dijelaskan oleh Douglas C. North melalui Hipotesis Neoklasik. Menurut Hipotesis Neo-Klasik, pada tahap awal pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat hingga mencapai titik puncaknya. Namun, seiring dengan berlanjutnya proses pembangunan, ketimpangan tersebut secara bertahap akan berkurang. Berdasarkan hipotesis ini, dapat disimpulkan bahwa negara berkembang umumnya mengalami tingkat ketimpangan wilayah yang lebih tinggi pada tahap awal pembangunannya,



sedangkan di negara maju, ketimpangan cenderung lebih rendah karena distribusi pembangunan yang merata (Sjafrizal, 2012).

Pada tahap awal pembangunan di negara berkembang, daerah yang lebih maju cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang yang ada, sementara daerah terbelakang kesulitan akibat keterbatasan infrastruktur dan kualitas SDM. Akibatnya, ketimpangan wilayah meningkat karena pertumbuhan ekonomi lebih pesat di daerah yang sudah berkembang, sedangkan daerah tertinggal mengalami pertumbuhan yang lebih lambat (Sjafrizal, 2012).

Teori ini juga menyatakan bahwa pada awal pembangunan, pergerakan modal dan tenaga kerja terkonsentrasi di wilayah maju yang cenderung memperlebar ketimpangan. Seiring berlanjutnya pembangunan dan peningkatan infrastruktur, mobilitas modal serta tenaga kerja menjadi lebih lancar. Akibatnya, ketika suatu negara mencapai tahap maju, ketimpangan wilayah akan berangsur menurun. Pola ini membentuk kurva ketimpangan berbentuk U terbalik (*reverse U-shape curve*).



Sumber: Sjafrizal (2012)

Gambar 1. 3 Kurva Ketimpangan Wilayah



2. Teori Backwash-Spreed Effect (Myrdal)

Menurut Myrdal (1957), ketimpangan wilayah dapat dijelaskan melalui konsep efek pembalikan (*backwash effect*) dan efek penyebaran (*spread effect*). *Spread effect* menggambarkan dampak positif distribusi manfaat ekonomi dari pusat pertumbuhan ke wilayah sekitarnya, sementara *backwash effect* terjadi ketika pertumbuhan pesat di pusat justru merugikan daerah sekitarnya akibat penyerapan sumber daya yang terkonsentrasi di pusat.

Myrdal (1957) berpendapat bahwa ketimpangan wilayah di negara-negara berkembang sering disebabkan oleh dominannya efek pembalikan (*backwash effect*) dibandingkan efek penyebaran (*spread effect*). Kondisi ini terjadi ketika aliran investasi cenderung terpusat di wilayah yang sudah maju, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan peningkatan pendapatan di wilayah tersebut. Namun, konsentrasi investasi ini memperlebar kesenjangan antara daerah maju dan terpencil. Daerah terpencil seringkali kekurangan sumber daya akibat ketimpangan alokasi investasi, yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperdalam ketimpangan.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kapasitas suatu negara dalam jangka panjang memenuhi kebutuhan penduduknya melalui penyediaan berbagai barang sa. Peningkatan kapasitas ini dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau



penyesuaian dalam teknologi, kelembagaan, dan ideologi yang selaras dengan tuntutan dan dinamika kondisi yang ada (Todaro, 2011).

Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika kinerja perekonomian suatu tahun melampaui pencapaian tahun sebelumnya. Pada tingkat nasional, hal ini tercermin melalui perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi juga dapat diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah. Setiap daerah menetapkan target pertumbuhan tahunan yang berfungsi sebagai dasar dalam merancang strategi pembangunan ekonomi di wilayahnya (Yuniarti *et al.*, 2020)

Terdapat beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonom. Berikut penjelasan mengenai teori tersebut (Adisasmita, 2013):

1. Teori Ekonomi Klasik (Adam Smith)

Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh dua faktor utama. Pertama, pertumbuhan output, yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, dan barang modal sebagai faktor produksi utama. Semakin banyak sumber daya yang dimanfaatkan secara efisien, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan penduduk, yang memperluas pasar dan meningkatkan permintaan, sehingga mendorong spesialisasi dan pembagian kerja. Spesialisasi ini meningkatkan produktivitas karena tenaga kerja dapat lebih fokus pada tugas tertentu, menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dan inovasi dalam proses produksi.



2. Teori Ekonomi Neo-Klasik (Solow-Swan)

Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik, yang dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemajuan teknologi serta perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam teori ini, modal, tenaga kerja, dan inovasi teknologi menjadi tiga elemen utama yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam modal dan peningkatan jumlah tenaga kerja dapat mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang, kemajuan teknologi menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi produksi.

3. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan kewirausahaan dalam mendorong inovasi. Teori ini menekankan bahwa kemajuan teknologi tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh inisiatif para pengusaha yang mampu mengidentifikasi peluang untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan bisnis yang sudah ada. Melalui inovasi dan ekspansi usaha, perekonomian mengalami pertumbuhan karena munculnya lapangan kerja baru, yang dapat menyerap tenaga kerja seiring dengan bertambahnya angkatan kerja setiap tahunnya.

4. Teori Harrod-Domar

Teori ini menyoroti peran utama akumulasi modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana investasi yang dilakukan dapat meningkatkan pendapatan sekaligus memperluas kapasitas produksi.



Model Harrod-Domar digunakan untuk menganalisis pertumbuhan suatu wilayah dengan mempertimbangkan perpindahan modal dan tenaga kerja sebagai faktor pendukung. Jika suatu wilayah memiliki tingkat tabungan yang rendah, maka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, wilayah tersebut perlu menarik modal dan tenaga kerja dari daerah lain sebagai solusi untuk meningkatkan investasi dan produktivitas.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator numerik yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia dalam suatu wilayah. IPM mencerminkan kualitas pembangunan manusia, yang secara langsung memengaruhi tingkat produktivitas dan potensi ekonomi daerah tersebut (Mahroji & Nurkhasanah, 2019). Terdapat lima cara untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu:

1. Pentingnya ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan.
2. Diperlukan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan individu.
3. Pendidikan formal harus mencakup semua jenjang, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.
4. Diperlukan program pendidikan untuk orang dewasa di luar organisasi perusahaan, termasuk program ekstensi khususnya di sektor pertanian.
5. Migrasi individu atau keluarga diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan peluang kerja yang terus berkembang.



IPM pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 sebagai cara untuk mengukur kemajuan manusia, yang bertujuan untuk menilai kapasitas dan kemampuan manusia

sebagai tolok ukur utama, bukan sekadar pencapaian ekonomi. UNDP menciptakan IPM untuk menekankan pentingnya kapasitas manusia dalam mengukur kemajuan suatu negara, menjadikannya model utama dalam penilaian kemajuan bangsa. Dengan demikian, perkembangan ekonomi bukan satu-satunya acuan dalam menilai kemajuan. IPM terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, dan standar hidup layak.

Konsep sumber daya manusia dijelaskan dalam Teori Modal Manusia (*Human Capital*). Menurut Becker (1957), manusia bukan hanya sebagai sumber daya namun modal (*capital*) yang menghasilkan pengembalian (*return*) dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Teori *human capital* menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas. Negara atau wilayah dengan SDM berkualitas akan lebih mudah mendorong perekonomian secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

United Nations Development Programme (UNDP) mengelompokkan IPM ke dalam empat kategori untuk melihat pencapaian IPM antar wilayah. Adapun kategori tersebut, yaitu:

1. IPM kategori rendah dengan nilai $IPM < 60$
2. IPM kategori sedang dengan nilai $60 \leq IPM < 70$
3. IPM kategori tinggi dengan nilai $70 \leq IPM < 80$
4. IPM kategori sangat tinggi dengan nilai $IPM \geq 80$



2.1.4 Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas negara. Pengeluaran ini mencakup operasional pemerintahan serta penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. Belanja pemerintah dipandang sebagai bentuk kewajiban negara dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dikuasainya, yang secara tidak langsung juga dimiliki oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, belanja pemerintah tidak hanya sekadar pengeluaran, tetapi juga alat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian makro, belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Dumairy (2007), pengeluaran pemerintah tidak hanya digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga untuk mendorong aktivitas ekonomi secara luas. Meskipun pemerintah tidak terlibat langsung dalam kegiatan bisnis, perannya dalam merangsang pertumbuhan ekonomi sangat krusial. Dengan alokasi anggaran yang tepat, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pengeluaran pemerintah juga berperan sebagai alat intervensi untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Efektivitasnya bergantung pada alokasi dan pengelolaan anggaran, yang jika direncanakan dengan baik, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata (Gulo *et al.*, 2017).

Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah (*government diture*) dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi sebagai berikut:



1. Teori Redistribusi Fiskal

Teori ini secara umum dikembangkan dari pemikiran para ekonom Keynesian dan post-Keynesian, seperti Richard A. Musgrave, yang dianggap sebagai pelopor teori keuangan publik modern. Dalam bukunya *"The Theory of Public Finance"* (1959), Musgrave menjelaskan bahwa fungsi utama pemerintah dalam sistem ekonomi modern terdiri dari tiga fungsi, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi distribusi menjadi dasar dari teori redistribusi fiskal yang menekankan bagaimana pemerintah berperan dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi melalui mekanisme fiskal. Pemerintah dapat menggunakan berbagai bentuk pengeluaran, seperti subsidi, bantuan sosial, dan transfer fiskal, untuk mendorong tercapainya kesejahteraan yang merata di masyarakat.

Dalam konteks ini, pengeluaran tidak hanya bertujuan mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan, tetapi juga berperan dalam menekan ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Musgrave, belanja publik bukan hanya alat administratif, melainkan alat intervensi yang dirancang secara aktif untuk mengarahkan perekonomian menuju kondisi yang lebih efisien, adil, dan stabil.

2. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah (Musgrave dan Rostow)

Menurut Musgrave dan Rostow, perkembangan pengeluaran negara beriringan dengan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada tahap awal, pengeluaran negara lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, guna



menciptakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi. Pada tahap menengah, investasi swasta mulai berkembang, tetapi pemerintah tetap berperan dalam penyediaan barang dan jasa publik untuk mengatasi kegagalan pasar. Sementara pada tahap lanjut, ketika ekonomi telah stabil, pengeluaran negara lebih banyak dialokasikan untuk program sosial, seperti kesejahteraan, layanan kesehatan masyarakat, dan jaminan hari tua, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Mangkoesebroto, 2001).

3. Hukum Wegner (Adolf Wegner)

Hukum Wagner juga dikenal dengan "*The Law of Expanding State Expenditure*". Hukum Wegner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama akan meningkat. Inti teori ini menyatakan bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah juga akan mengalami peningkatan secara proporsional. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kebutuhan terhadap berbagai layanan publik. Faktor utama yang mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah meliputi penguatan sektor pertahanan dan keamanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan sektor perbankan, serta peningkatan belanja untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya. (Mangkoesebroto, 2001).



2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan proses pembangunan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara tidak selalu membawa pemerataan di seluruh wilayah. Manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung terpusat di wilayah dengan infrastruktur, akses pasar, dan sumber daya yang lebih baik, sementara daerah kurang berkembang sering kali tidak menikmatinya secara proporsional. Hal ini menyebabkan ketimpangan wilayah tetap ada atau bahkan meningkat.

Menurut pandangan Myrdal (1957), ketika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama kota-kota besar atau pusat industri, *backwash effect* sering kali mendominasi dibandingkan *spread effect*, di mana sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan investasi dari daerah yang kurang berkembang tersedot ke wilayah yang sudah maju. Akibatnya, daerah tertinggal semakin sulit untuk tumbuh karena kehilangan faktor produksi utama yang seharusnya mendorong ekonomi lokalnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak selalu berdampak merata, melainkan dapat memperdalam ketimpangan wilayah. Dominasi *backwash effect* dibandingkan *spread effect* menyebabkan daerah yang lebih maju semakin berkembang, sementara daerah tertinggal kesulitan mengejar ketinggalannya akibat aliran sumber daya yang tidak seimbang.



2.2.2 Hubungan Antara IPM dan Ketimpangan Wilayah

IPM merupakan indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia, yang secara langsung memengaruhi tingkat pembangunan suatu wilayah (Azim *et al.*, 2022). IPM memiliki kaitan erat dengan ketimpangan wilayah, di mana wilayah dengan IPM tinggi cenderung memiliki akses lebih baik terhadap layanan publik, infrastruktur, dan peluang ekonomi, sehingga mendorong pembangunan yang lebih merata. Sebaliknya, wilayah dengan IPM rendah sering kali terbatas dalam mengembangkan potensinya, yang memperburuk ketimpangan.

Teori *human capital* yang dikemukakan oleh Becker (1957) mengemukakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan keterampilan dipandang sebagai bentuk investasi yang dapat meningkatkan produktivitas individu. Wilayah dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, memiliki peluang kerja yang lebih luas, dan kesejahteraan yang lebih merata. Oleh karena itu, peningkatan IPM dapat dilihat sebagai strategi investasi jangka panjang untuk mendukung pemerataan pembangunan. Ketika daerah tertinggal diberi akses yang setara terhadap layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pelatihan keterampilan, maka kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2.2.3 Hubungan Antara Belanja Pemerintah dan Ketimpangan Wilayah

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan tergantung dari bagaimana rencana kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Belanja pemerintah yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah yang



merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah, semakin besar dampaknya terhadap perekonomian di suatu daerah. Pengeluaran ini berfungsi sebagai suntikan bagi perekonomian melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas sumber daya yang ada. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi mengurangi ketimpangan yang ada di wilayah tersebut (Wahyu Dhyatmika & Dwi Atmanti, 2013).

Sejalan dengan hal tersebut, teori redistribusi fiskal memandang bahwa ketimpangan terjadi karena adanya distribusi sumber daya yang tidak merata, sehingga intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal menjadi penting untuk menciptakan keseimbangan. Dalam konteks ini, alokasi belanja pemerintah ke daerah tertinggal baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, maupun program pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi dan pelayanan dasar. Dengan memberikan porsi anggaran yang lebih besar kepada wilayah yang kurang berkembang, pemerintah dapat mendorong konvergensi ekonomi antarwilayah. Lebih lanjut, Musgrave menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam distribusi fiskal, di mana daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah perlu mendapat dukungan lebih besar agar mampu menyediakan pelayanan publik yang setara dengan daerah yang lebih maju. Oleh karena itu, melalui prinsip redistribusi, belanja pemerintah berperan tidak hanya dalam mendorong perekonomian secara umum, tetapi juga mewujudkan pemerataan di berbagai

h.



2.3 Studi Empiris

Khoir Akfina Didia (2016) meneliti terkait pengaruh investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pembangunan di kawasan Kedungsepur. Penelitian ini menggunakan indeks williamson dalam mengukur ketimpangan dan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dalam mengukur pengaruh variable independen terhadap ketimpangan pembangunan. Hasilnya menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di wilayah Kedungsepur masih tergolong tinggi. Variabel IPM dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sebaliknya, variabel investasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan, sedangkan TPAK memberikan pengaruh positif yang juga tidak signifikan terhadap ketimpangan.

Zusanti *et al.*, (2020) melakukan analisis untuk melihat pengaruh IPM, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pembangunan di pulau Jawa pada tahun 2010-2018. Metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah Indeks Williamson, sementara analisis pengaruh variabel independen terhadap ketimpangan dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi justru tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan.



ansyur *et al.*, (2021) melakukan penelitian terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan

pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini mengukur tingkat ketimpangan menggunakan Indeks Williamson dan menggunakan analisis regresi linier berganda dalam mengukur pengaruh variable independen terhadap ketimpangan pembangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaliknya, investasi dan pengeluaran pemerintah masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di provinsi Sulawesi Selatan.

Aprilianti, V., & Harkeni, A. (2021) melakukan penelitian terkait pengaruh IPM terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi. Penelitian ini juga menggunakan variable PDRB dan PAD sebagai variable kontrol untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap ketimpangan wilayah. Metode yang digunakan dalam mengukur ketimpangan adalah Indeks Williamson dan menganalisis pengaruh variabel independent terhadap ketimpangan melalui metode regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa IPM memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jambi. Dimana peningkatan IPM sebesar 1 (satu) satuan akan mereduksi ketimpangan wilayah sebesar 0,007 satuan.

Riandoko Adi Kurniawan dan FX. Sugiyanto (2013) melakukan penelitian dengan judul terkait ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2002-2010. Penelitian ini menggunakan konsep PDRB per kapita



untuk mengukur ketimpangan, serta metode analisis regresi data panel pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) untuk menganalisis pengaruh independen, yaitu pertumbuhan ekonomi, aglomerasi sektor pertanian,

aglomerasi sektor industri, dan tingkat orang bekerja terhadap ketimpangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan. Aglomerasi sektor pertanian dan aglomerasi sektor industri masing-masing memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap ketimpangan. Sementara itu, tingkat orang bekerja memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan.

Lukman Harun dan Ghozali Maski (2012) meneliti terkait pengaruh pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Jawa Timur. Penelitian ini mengukur tingkat ketimpangan menggunakan Indeks Williamson dan menganalisis pengaruh variabel pengeluaran pemerintah daerah serta pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan melalui metode regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketimpangan, menunjukkan perannya dalam mengurangi kesenjangan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif dan signifikan, mengindikasikan potensi peningkatan ketimpangan seiring pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Ketut Wahyu Dhyatmika dan Hastarini Dwi Amati (2013) melakukan penelitian terkait ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten pasca pemekaran pada tahun 2001-2011. Penelitian ini mengukur ketimpangan pembangunan menggunakan Indeks Williamson, Tipologi Klassen untuk



klasifikasi kabupaten/kota di Provinsi Banten, serta analisis regresi data dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM) untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran, dan penanaman modal asing

(PMA) terhadap ketimpangan. Hasilnya menunjukkan tingkat ketimpangan cenderung meningkat. Berdasarkan Tipologi Klassen, Kota Cilegon dan Kota Tangerang termasuk daerah maju cepat tumbuh, Kabupaten Tangerang sebagai daerah berkembang, sementara Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Serang tergolong daerah tertinggal. PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan tingkat pengangguran tidak berpengaruh.

Nita Tri Hartini (2015) menganalisis pengaruh PDRB per kapita, investasi, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2011-2015. Penelitian ini mengukur ketimpangan menggunakan konsep PDRB per kapita relatif dan menganalisis pengaruh variabel-variabel independen, yaitu PDRB per kapita, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terhadap ketimpangan melalui metode regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, sementara investasi dan IPM memberikan pengaruh negatif yang signifikan, mencerminkan peran penting keduanya dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. (2022) meneliti terkait determinan ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah Indeks Williamson, sementara analisis pengaruh variabel independen terhadap ketimpangan dilakukan dengan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Penelitian ini disimpulkan bahwa secara parsial indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi



antarwilayah, infrastruktur jalan dan penanaman modal dalam negeri tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah, penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah.

Liling Vera Yusica *et al.*, (2018) meneliti terkait ketimpangan pembangunan di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan konsep PDRB per kapita relatif untuk mengukur ketimpangan dan metode analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur secara umum berada dalam kategori rendah, meskipun beberapa daerah mengalami tingkat ketimpangan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, sedangkan aglomerasi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah.

Heny Sucihati (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh kenaikan investasi swasta dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data time series tahun 1990–2010 dan menerapkan metode analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap ketimpangan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.



husus, peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1% akan catkan ketimpangan pembangunan sebesar 0,517%. Temuan ini

mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pemerintah justru terkait dengan melebar-nya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kalimantan Barat.

Ersad *et al.*, (2022) dalam penelitiannya terakai dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan selama periode 2020-2019 tergolong kategori sedang. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Bagian selatan. Sedangkan IPM dan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Bagian selatan.

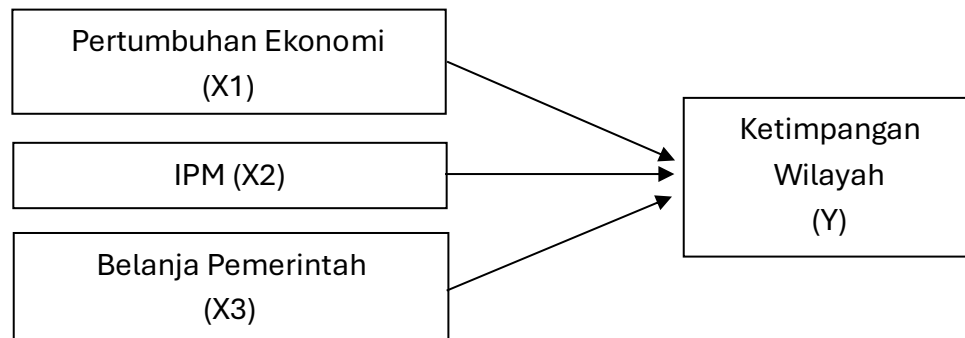
Wijayanti *et al.*, (2023) melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, upah minimum provinsi terhadap ketimpangan pendapatan provinsi di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan provinsi di Pulau Jawa, IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan UMP memiliki pengaruh negative signifikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi di Pulau Jawa.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka ini adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan i dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti diuraikan dengan teori diatas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana



pertumbuhan ekonomi, IPM, dan belanja pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah tiap provinsi di Indonesia.



Gambar 1. 4 Kerangka Konseptual

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kapasitas suatu wilayah dalam meningkatkan output dan kesejahteraan masyarakat. Namun, secara teoritis Myrdal (1957) berpendapat bahwa pertumbuhan yang tidak merata justru dapat memperparah ketimpangan antarwilayah akibat dominasi *backwash effect* yang menarik sumber daya dari daerah tertinggal ke wilayah yang lebih maju.

Seiring dengan itu, kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut berkontribusi terhadap perbedaan tingkat pembangunan antarwilayah. Berdasarkan teori *human capital* oleh Becker (1957), peningkatan IPM meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu daerah, sehingga wilayah dengan IPM tinggi cenderung lebih maju. Ketimpangan wilayah dapat ditekan jika daerah dengan IPM rendah diberi akses yang setara terhadap layanan dasar.

Selanjutnya, belanja pemerintah dianggap sebagai alat intervensi fiskal mendorong perekonomian. Teori redistribusi fiskal menekankan pentingnya alokasi anggaran yang adil untuk wilayah tertinggal agar mereka memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses infrastruktur dan pelayanan



publik. Dukungan fiskal yang proporsional dapat memperkecil ketimpangan wilayah dan menciptakan pembangunan yang inklusif.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan pembahasan di atas, didapatkan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Indonesia periode 2019-2023.
2. Diduga IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Indonesia periode 2019-2023.
3. Diduga belanja pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah provinsi di Indonesia periode 2019-2023.

